

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020 tentang Cipta Kerja otomatis menjadi hukum yang berlaku setelah selesai dibacakan, hal ini dikarenakan sifat putusan MK yang final dan mengikat (*final and binding*) dan tidak ada upaya hukum atas Putusan MK. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa perizinan usaha (legalitas UMKM berupa NIB) yang diterbitkan sebelum dan sesudah adanya putusan MK memiliki kekuatan hukum dikarenakan UUCK masih berlaku dan mengikat di masyarakat (memiliki dasar hukum) sesuai amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) hingga disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak ada mengubah isi substansi yang ada pada UUCK termasuk aturan turunannya, kecuali memperbaiki hal-hal yang sesuai dengan intruksi MK dalam putusannya. Berdasarkan hal-hal tersebut diketahui bahwa NIB (legalitas UMKM) yang dikeluarkan sebelum adanya Perpu Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum OSS RBA masih berlaku, baik itu sebelum dan sesudah Perpu Cipta Kerja disahkan

menjadi UU. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juga telah memenuhi 4 (empat) syarat atau kriteria kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

B. SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif sebagai pembuat undang-undang haruslah memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, tujuannya supaya undang-undang yang dibuat dapat berguna dan tidak melanggar hak-hak masyarakat seperti halnya yang terjadi pada UUCK. Pembentukan UUCK terbukti menimbulkan kontroversi di masyarakat sekaligus terbukti bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020, akibatnya menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat terkhusus bagi pelaku usaha terkait status UUCK apakah masih berlaku atau tidak. Pemerintah perlu juga mengkaji ulang mengenai substansi yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023) agar masyarakat terkhusus buruh (klaster ketenagakerjaan) merasa haknya dapat dijamin oleh UU. Partai Buruh tertanggal 15 April 2023 telah mengajukan uji formil dan uji materil ke MK hal ini tentu berdampak buruk terhadap keberlangsungan UU Nomor 6 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Yuhelson, H. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (p. 6). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Suherman, Ade Maman. (2006). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tirtamulia, Tjondro. (2016). *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Martokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Siahaan. (2016). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (p. 15). Jakarta: Grasindo.
- Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mamudji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* (p. 13). Depok: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Mamudji, S. S. (2022). In *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (p. 13). Depok: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. In P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (p. 95). Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (pp. 61-62). Mataram-NTB: Mataram University Press.

Soerjono Soekanto, S. M. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Depok: Rajawali Pers.

Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Achmad Roestand. (2006). *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Jurnal:

Habibi, A. (2022). Jalan Panjang Mengobati Obesitas Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 232.

Erni, F. J. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 250-251.

Yuliani, Andi. (2017). Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 432-433.

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 161.

Haryono, D. (Volume 18, Nomor 4, Desember 2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 791.

Dewi. N. (2019). Sengkarut Regulasi: Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 63-64.

Jamhir, R. M. (2018). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. *Jurnal Justisia*, 91.

- Malik, F. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.9 No. 1 Februari 2021*, 192.
- Manullang, E. F. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 459.
- Mario Julyano, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *JURNAL CREPIDO*, 19-20.
- Kau, Sofyan A.P. (2014). Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir. *Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 110-111.
- Kushidayati, Lina. (2014). Hermeneutika Gadamer Dalam kajian Hukum, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 65.
- Manullang, E Fernando M. (2018). Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 401.
- Muhammad Ikhsan Kasturi, R. A. (Volume 6 Issue 2 Oktober 2022). Implikasi Hukum UMKM Pasca Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja. *Maleo Law Jurnal*, 213.
- Mukhammad, B. (Volume 1 Nomor 2, November 2021). PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *JURNAL NALAR KEADILAN*, 17.

- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 192.
- Purnamasari, G. C. (Vol. 2, No. 1, 2017). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.
- Putra, A. (2021). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, 292.
- Rishan, I. (2020). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 6.
- Samekto, A. (Vol. 7, No. 1, April 2019). MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF FILOSOFIS. *Jurnal Hukum Progresif*, 1-2.
- Saragih, G. M. (Vol.1, No.4 Desember 2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 31.

- Sulistiyawan, M. J. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido (Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum)*, 14.
- Toddington, H. P. (1999). International Criminal Law Review The End of an Era: Static and Dynamic Interpretation in International Courts. *Special Issue International Criminal Law and Philosophy of Law*, 40.
- Tunardy, W. T. (2020, November 30). *Jurnal Hukum*. Retrieved from jurnalhukum.com: <https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>
- Urbanus Ura Weruin, D. A. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 98.
- Weppy Susetiyo, M. Z. (2022). KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG KESEHATAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun*, 34.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Internet:

<https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/Infografis%20Perizinan%20Berusaha%20Berbasis%20Risiko.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/03150091/penggolongan-hukum-menurut-bentuknya>

123dok. (n.d.). Retrieved from 123dok.com: <https://123dok.com/article/tinjauan-umum-kepastian-hukum-bab-ii-tinjauan-pustaka.zlgokn9r>

Agus Paramuriyanto, D. T. (2011/2012). *scribd*. Retrieved from scribd.com: <https://id.scribd.com/doc/72657680/TEORI-HERMENEUTIKA#>

Ananda. (2021). *Gramedia Blog*. Retrieved from www.gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

- Benuf, K. (2020, Oktober 7). *ResearchGate*. Retrieved from www.researchgate.net:
https://www.researchgate.net/profile/KorneliusBenuf/publication/344519287_Paradigma_Positivism_Stufenbau_Theory_dan_Theory_Hukum_Murni/links/5f7de394a6fdccfd7b4f5764/Paradigma-Positivism-Stufenbau-Theory-dan-Theory-Hukum-Murni.pdf
- Budianto, V. A. (2022, April 21). *hukumonline.com*. Retrieved from hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>
- CNN Indonesia. (2021, November 26). *CNN Indonesia*. Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125204418-12-726228/penjelasan-ahli-soal-putusan-mk-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat/2>
- Fauzi, H. (2023, Maret 22). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Retrieved from kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/read/perpu-cipta-kerja-disahkan-jadi-uu-umkm-makin-mudah-proses-sertifikasi-halal>
- Gramedia*. (2021). Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- Humas. (2021, September 22). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/diluncurkan-agustus-sistem-oss-telah-terbitkan-lebih-dari-200-ribu-nomor-induk-berusaha/>
- Humas. (2022, Desember 30). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id>:
<https://kbbi.web.id/hukum>
- Martoredjo, N. T. (2020, Desember 17). *Binus University*. Retrieved from binus.ac.id:
<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>
- Meiryani. (2021, Agustus 12). *Binus University*. Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>
- oss. (n.d.). Retrieved from oss.go.id: <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>
- Pattiasina, P. J. (2018, April). *HERMENEUTIK*. Retrieved from [researchgate](https://www.researchgate.net/publication/325216565_HERMENEUTIK):
https://www.researchgate.net/publication/325216565_HERMENEUTIK
- Santia, T. (2022, Oktober 20). *Liputan 6*. Retrieved from www.liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5102761/kementerian-investasi-telah-terbitkan-239-juta-nib-hingga-20-oktober-2022>
- Yasin, M. (2019, Agustus 16). *hukumonline*. Retrieved from hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hermeneutika-hukum--jalan-falsafati-memahami-teks-teks-hukum-lt5d558d3f13f30?page=1>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum--objek--dan-pelaksanaan-oss-rba-lt63d24e85d4040/>